

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan di Indonesia saat ini masih fokus untuk mengungkapkan laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Saat ini kinerja keuangan sudah tidak lagi relevan dalam memberikan suatu informasi (Wibowo dan Faradiza, 2014). Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel dan juga tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin bagus. Hal ini memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya (Novita dan Djakman, 2008).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Untuk itu dibutuhkan suatu sarana yang dapat memberikan informasi mengenai aspek sosial, lingkungan dan keuangan secara sekaligus. Sarana tersebut dikenal dengan nama laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (Wibowo dan Faradiza, 2014). Laporan berkelanjutan (*sustainability reports*) yang saat ini menjadi tren dalam kebutuhan perusahaan untuk mengetahui kegiatan operasionalnya dalam perihal untuk mengetahui kinerja, lingkungan dan

sosial, dan juga atas pemangku kepentingan seperti *stakeholders* atau pemegang saham perusahaan tersebut (Chariri, 2009).

Elkington (1997) dalam Soelistyoningrum dan prastiwi (2008) menyatakan:

“At its narrowest, the term “triple bottom line” is used as a framework from measuring and reporting corporate performance against economic, social and environmental parameters. At its broadest, the term is used to capture the whole set of value, issue and processes that companies must address in order to minimize any harm resulting from their activities and to create economic, social and environmental value. The three lines represent society, the economic and the environment. Society depends on the economic – and the economy depends on the global ecosystem, whose health represents the ultimate bottom line”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *sustainability reporting* tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Dengan menganalisis perkembangan *corporate social responsibility*, didapatkan bahwa terdapat keterbatasan dalam mendukung kehidupan manusia sehingga perlu adanya upaya untuk menyadarkan dan membuat manusia peduli tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga lingkungan sosialnya (*sustainability communication*).

Sustainability report mempunyai beragam fungsi. Bagi perusahaan, *sustainability report* merupakan alat ukur pencapaian target kerja dalam isu *triple bottom line*. Bagi investor, *sustainability report* berfungsi sebagai alat kontrol atas capaian kinerja perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumberdaya finansialnya. Sementara bagi pemangku kepentingan lainnya (media, pemerintah, konsumen, akademis dan lain – lain) *sustainability report* menjadi tolak ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Wibowo dan Faradiza, 2014).

Dengan dilakukannya pengungkapan *sustainability report*, perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik. Perusahaan akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal. *Image* dan pengakuan yang baik atas kinerja perusahaan menjadi salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan pertimbangan tersebut, maka investor cenderung akan melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik karena investor yakin bahwa reputasi yang baik dapat diperoleh jika perusahaan tersebut telah memiliki kinerja ekonomi yang baik pula. Semakin baik kinerja yang ditunjukkan dalam laporan keuangan, maka semakin banyak pula investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Akibatnya harga saham akan semakin meningkat (Shobirin, 2011).

Kandungan informasi dalam *sustainability reporting* diharapkan mampu memberikan sinyal positif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi investor apabila informasi tersebut mengundang reaksi untuk melakukan transaksi di pasar modal (Hartono, 2009).

Sustainability report di Indonesia telah dipraktikkan sejak tahun 2000 dan pedoman *global reporting initiative* (GRI) telah digunakan sebagai referensi bagi laporan perusahaan. Perusahaan yang pertama kali mengungkapkan *sustainability report* sebagai laporan yang terpisah adalah PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2005. Manajemen perusahaan berharap dengan adanya pencantuman laporan berkelanjutan tersebut, dapat digunakan sebagai alat yang paling penting yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder* perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2006). Pada dasarnya *sustainability report* (SR) sulit dibedakan dari *corporate social responsibility*

(CSR), keduanya merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membedakan antara SR dengan CSR adalah cara pengungkapannya. Pengungkapan SR lebih terperinci dan berdiri sendiri, sedangkan pengungkapan CSR terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan.

Kinerja keuangan adalah faktor yang menjadi acuan investor dalam melakukan pembelian saham. Bagi suatu perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham perusahaan tetap menarik bagi para investor. Para investor melakukan *overview* suatu perusahaan dengan melihat rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi (Puspitasari, 2009).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitiannya. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan di Indonesia sangat diminati para penanam modal baik dari dalam negeri maupun asing. Selama 2012, sektor pertambangan menempati realisasi penanaman modal asing (PMA) tertinggi, yaitu sebesar US\$ 4,3 miliar. Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PDMN) untuk sektor pertambangan adalah sebesar Rp 10,5 triliun, tertinggi ketiga di antara sektor – sektor lainnya (BKPM, 2013). Meskipun memberikan dampak positif yang begitu besar terhadap perekonomian Indonesia, sektor pertambangan juga memberikan dampak negatif yang tidak kalah besar dalam ranah lingkungan. Sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan (Messwati, 2012).

Perusahaan dalam sektor pertambangan juga kerap menimbulkan masalah dalam lingkup sosial seperti kasus pembakaran kantor perwakilan PT. International Nickel Indonesia, Tbk (sekarang bernama PT. Vale Indonesia, Tbk)

oleh masyarakat Desa Lele, Kecamatan Bahodapi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Masyarakat melakukan pembakaran tersebut karena pihak perusahaan melarang masyarakat mengelola lahannya untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga tidak memenuhi janjinya untuk merekrut masyarakat sebagai tenaga kerja (Christina, 2012 dalam Prayosho, 2013).

Dari kasus di atas, menunjukkan bahwa komitmen perusahaan dalam pendiriannya tidak sesuai dengan UU No.40/2007 tentang perseroan terbatas. Dimana ketentuan umum pada pasal 1 poin ke 3 menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Namun, dalam faktanya hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan kita, setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Tak hanya hutan, sungai kita pun dikorbankan. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah. Ekonomi sumber daya manusia (ESDM) dinilai melakukan pembiaran atas kehancuran ini dan dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan berubahnya pola

ekonomi masyarakat. Melihat kondisi inilah, Jaringan advokasi tambang (Jatam) menuntut secara tegas agar energi dan sumber daya mineral tunduk kepada UU No.32/2009 dan tidak mengintervensi Kementerian Lingkungan Hidup, segera menghentikan izin usaha pertambangan dan mengevaluasi perusahaan yang merusak lingkungan, menutup segera tambang di wilayah hutan untuk menahan laju daya rusak tambang. (diakses Kompas.com tanggal 28 september 2012/17:33).

Di Indonesia, sebagian besar perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sudah membuat CSR. Sementara *National Center of Sustainability Reporting* (NCSR) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 40 perusahaan di Indonesia yang membuat *sustainability report* pada 2012 dan jumlah ini adalah yang paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pembuat SR didominasi oleh perusahaan dari sektor tambang (Meryana, 2013).

Pada penelitian terdahulu telah menjelaskan mengenai *sustainability report* dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Soelistyaningrum dan Prastiwi (2010) yang menjelaskan mengenai pengaruh *sustainability report* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukannya variabel kinerja keuangan diproksikan menggunakan ROA, CR dan DPR.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Soelistyaningrum dan Prastiwi (2010) adalah pada penelitian ini menggunakan ROE, ROA dan CR sebagai pengukur kinerja keuangan dan juga peneliti menambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (SIZE). Dan tahun penelitian pada perusahaan pertambangan adalah tahun 2010 – 2013, itu dikarenakan dari beberapa kasus pertambangan yang terjadi selama tahun tersebut dan juga tahun 2013 adalah

masa terakhir acuan *sustainability report* menggunakan GRI-G3, sebelum di tahun 2014 *sustainability report* menggunakan acuan GRI-G4.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan perumusan masalah adalah :

1. Apakah pengaruh pengungkapan *Sustainability Report* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap *Return On Equity* (ROE)?
2. Apakah pengaruh pengungkapan *Sustainability Report* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap *Return On Asset* (ROA)?
3. Apakah pengaruh pengungkapan *Sustainability Report* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap *Current Ratio* (CR)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *sustainability report* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang meliputi ROE, ROA dan CR.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan.
2. Kegunaan praktisi, dapat memberikan tambahan informasi mengenai teori dan konsep yang diterima selama di bangku perkuliahan sehingga para mahasiswa dapat mengaplikasikannya.